

# SKRIPSI

MARIATI SIMAMORA

## PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI KONSEKUENSI PENERBITAN OBLIGASI PEMERINTAH



KK.  
Per. 2267/97  
Sim  
P.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

1997

**PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI KONSEKUENSI  
PENERBITAN OBLIGASI PEMERINTAH**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH :**

**MARIATI SIMAMORA**

**(039313688)**

**DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI,**



**SRI HANDAJANI, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A**


**1997**

DIUJI PADA TANGGAL ; 29 JANUARI 1997

PANITIA PENGUJI ;

KETUA ; DJASADIN SARAGIH ,SH.LL.M. ....

SEKRETARIS ; NANIEK ENDANG WREDININGSIH,SH. .... 

ANGGOTA ;  
1. SRI HANDAJANI,S.H., M.Hum. .... 

2. Dr.MOCH. ISNAENI, SH.MS. .... 

3. Hj. MOERDIATI, SH.MS. .... 

## BAB V

## P E N U T U P

a. Kesimpulan

- a. Meskipun Perjanjian Perwaliamanatan tidak diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 bukan berarti perjanjian tersebut tidak ada landasan hukumnya, melainkan dapat kita gunakan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal sebagai aturan pelaksanaannya. Hal ini selaras dengan asas Kebebasan Berkontrak yang menjadi prinsip utama dalam perjanjian. Disamping itu ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dapat juga menarik ketentuan tentang perjanjian pinjam-meminjam uang yang diatur dalam BW.
- b. Oleh karena hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Emiten, Wali amanat dan Pemegang Obligasi tidak secara bersamaan khususnya Pemegang Obligasi maka kedudukan serta haknya perlu diperhatikan. Mengingat kepentingannya juga tidak kecil dan ia bukan pihak penandatangan maka posisinya secara hukum harus benar-benar terjamin. Dengan demikian tidak akan timbul ketimpangan antara kedudukan pihak yang satu dengan pihak yang lain berkaitan dengan kepentingannya.
- c. Mengingat Wanprestasi dapat terjadi karena tindakan emiten maupun wali amanat secara teoritis, yang berarti kedudukan Pemegang Obligasi sangat rawan dan dekat dengan resiko. Oleh karena itu ada benarnya jika

pendapat Ketua BAPEFAM, IPG Ary Suta kita tinjau kembali untuk mewujudkan sikap keterbukaan Emiten bagi keperluan investor agar mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya hal-hal yang dapat merugikannya. Namun jika wanprestasi telah terjadi dan kepentingan investor telah terganggu karenanya maka upaya hukum sebagai jalan keluarnya. Yang menjadi kendala saat ini adalah kewenangan BAPEFAM yang sangat terbatas, sehingga tidak berhak menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan hukum dibidang Pasar Modal. Jadi sebaiknya para pihak terlebih dahulu bermusyawarah sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan.

b. Saran

- a. Oleh karena Perjanjian Perwaliamanatan belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Pasar Modal, maka sebaiknya diatur dalam suatu peraturan pelaksana yang memungkinkan untuk dijadikan pedoman bagi para pihak terutama mengenai makna hubungan perwaliamanatan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pertentangan pendapat mengenai apa itu hubungan perwaliamanatan diantara pelaku Pasar Modal.
- b. Meskipun Pemegang Obligasi bukan sebagai pihak penandatanganan perjanjian, ia juga wajib diberi informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Oleh karena itu emiten harus terbuka mengenai keadaan perusahaannya terutama yang menyangkut

kepentingan Pemegang Obligasi. Dengan begitu Pemegang Obligasi akan menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam perjanjian.

c. Agar perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi lebih efektif dan efisien, disarankan upaya-upaya sebagai berikut :

1. memberikan wewenang kepada BAPEPAM sebagai lembaga yang kompeten untuk dapat berperan lebih dari hanya sekedar penengah. Dengan kemandirian lembaga ini maka peraturan perundangan tentang pasar modal menjadi wewenangnya dalam hal pemeriksaan aspek-aspek yang timbul berkaitan dengan pasar modal tersebut,
2. bagi masyarakat calon pemegang hendaknya mencari informasi terlebih dahulu tentang emiten maupun wali amanat yang bersangkutan. Demikian pula bagi Bursa Efek yang setidaknya dapat memberikan informasi yang layak bagi calon pemegang atau masyarakat lain yang membutuhkannya.